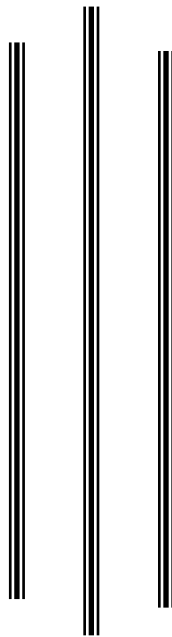




RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

2024

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Rencana Kerja

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) Tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sehingga Renja Tahun 2025 disempurnakan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan dan arahan dari pemangku kepentingan yang disepakati dalam proses Musrenbang.

Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, bahwa untuk mewujudkan visi, misi yang telah ditetapkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Proses penyusunan rencana program dan kegiatan yang biasa disebut dengan perencanaan kinerja kegiatan merupakan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2025 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*Stake holder*) yang ada, baik secara formal maupun non formal.

Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah :

1) Tahap Persiapan

Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dilakukan sebelum Rancangan Awal RKPD diterima. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen

Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap Rancangan RPJM Daerah dan Rancangan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan RKPD secara resmi dari Bappeda.

3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Dokumen Renja

Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD melaksanakan forum PD dan mengacu pada dokumen RKPD.

1.1.3 Keterkaitan Renja dengan Renstra.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 berpedoman kepada Rancangan Renstra Inspektorat Daerah. Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021-2026 memuat arah kebijakan teknis dan rencana program sesuai bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

1.1.4 Keterkaitan Renja dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Inspektorat Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK, BPKP dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2.Landasan Hukum

1.2.1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

1.2.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

1.2.3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 1.2.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 1.2.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 1.2.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 1.2.8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 1.2.9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.2.10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025;
 - 1.2.11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 - 1.2.12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
 - 1.2.13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 1.2.14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; dan
 - 1.2.15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mengoptimalisasi pencapaian sasaran dalam Renstra Inspektorat Daerah, maka tujuan dalam menyusun rancangan awal Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju;
- 1.3.2. Dasar penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting
- 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah dan Capaian Rencana Strategis Inspektorat Daerah.

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/B.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapat alokasi dana sejumlah Rp7.056.523.768,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Program = 3 program
 - Jumlah Kegiatan = 10 kegiatan
 - Jumlah Sub Kegiatan = 34 sub kegiatan
- dengan rincian anggaran berikut :
- Belanja Operasi = Rp 6.959.331.489,00
 - Belanja Modal = Rp 92.000.000,00

Tingkat penyerapan keuangan Inspektorat Daerah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp7.039.083.169,00 atau 98,36% sedangkan untuk persentase indikator kinerjanya sebesar 95,84%. Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang tidak dapat diprediksi karena sebagian besar dilaksanakan berdasarkan perintah Bupati, permintaan Aparat Penegak Hukum, tindak lanjut berita media massa, dan atau pengaduan masyarakat, sehingga mempengaruhi persentase fisiknya.

Namun dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada dasarnya semua program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Adapun kebijakan atau tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja antara lain :

1. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal;
2. Meningkatkan peran APIP sebagai *Quality Assurance, Consulting and Early Warning*;
3. Kerjasama dan tanggungjawab ASN dalam mewujudkan sasaran strategis;
4. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi; dan
5. Komitmen pimpinan dalam memberikan respon atau tanggapan yang baik.

Adapun gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra tertuang dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024
 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja, Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2023			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023*	Tingkat Realisasi (%)*		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 layanan	11 layanan	11 layanan	11 layanan	100	11 layanan	11 layanan	100
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil PD	5 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen Renja Tahun 2022 dan Renja Perubahan 2021	10 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah dokumen Renstra PD Tahun 2021 - 2024	1 dokumen	0 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Pelaksanaan Forum PD	5 kali	1 kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	n/a	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	8 Dokumen	50
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Tahun 2022	5 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	50
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan Tahun 2021	5 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	50
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	5 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	5 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen ROPK	5 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 dokumen	n/a	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	6 dokumen	50
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA	5 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	5 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 dokumen	n/a	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4 Dokumen	50
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68 Laporan	n/a	17 laporan	17 laporan	100	17 Laporan	34 Laporan	50
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP	5 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan e-Monev	20 dokumen	4 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan TEPRA	60 dokumen	12 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	n/a	5 laporan	5 laporan	100	5 Laporan	10 Laporan	50

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	29 dokumen	29 dokumen	29 dokumen	29 dokumen	100	29 dokumen	29 dokumen	25
		Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	130 bulan	14 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2800 Orang/bulan(50x14)	n/a	700 Orang/bulan(50x14)	700 Orang/bulan(50x14)	100	700 Orang/bulan(50x14)	1400 Orang/bulan(100x14)	50
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	n/a	1 laporan	1 laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	50
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ	60 dokumen	12 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	5 dokumen	2 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	52 Laporan	n/a	13 laporan	13 laporan	100	13 Laporan	26 Laporan	50
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	49 orang	49 orang	49 orang	49 orang	100	49 orang	49 orang	100
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian ASN	245 ASN	49 ASN	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah JFA dan P2UPD yang mendapat penilaian angka kredit	150 orang	30 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	n/a	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	12 dokumen	50
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparat pengawasan	135 orang	21 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Peningkatan kualitas aparat pengawasan (Pelatihan Kantor Sendiri/PKS)	20 Kali	4 Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	n/a	30 orang	30 orang	100	30 Orang	60 Orang	50
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum terlayani	5 layanan	5 layanan	5 layanan	5 layanan	100	5 layanan	5 layanan	100
		Persentase layanan administrasi umum terlayani	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	15 jenis	3 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	n/a	4 paket	4 paket	100	4 Paket	8 Paket	50
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4, F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll) Jumlah belanja modal Alat Ukur/ Sketmat sigmat	7 Unit	7 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah belanja modal Camera	1 unit	0 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah belanja modal Handycam	1 unit	0 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah belanja modal Hardis External	7 unit	7 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah belanja modal Komputer PC All in One	2 unit	2 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah belanja modal laptop Core 15	13 unit	13 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah belanja modal Mesin Hitung/hand counter	7 unit	7 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah belanja modal Penghancur Kertas	2 unit	2 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah belanja modal Steam Alat Cuci Mobil	2 unit	2 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah belanja modal Scanner ADF	2 unit	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	n/a	4 paket	4 paket	100	4 Paket	8 Paket	50
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	50 jenis	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	n/a	4 paket	4 paket	100	4 Paket	8 Paket	50
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	25 jenis	5 jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah penggandaan yang tersedia	30000 lembar	6000 lembar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	n/a	4 paket	4 paket	100	4 Paket	8 Paket	50
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (1 eksemplar x 12 bulan)	60 bulan	12 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1040 dokumen	n/a	260 dokumen	260 dokumen	100	260 dokumen	520 dokumen	50
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah minuman dan snack tamu	750 OR	150 OR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 laporan	n/a	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	8 laporan	50

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah	300 OH	60 OH	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas luar daerah	125 OH	25 OH	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah minuman dan snack tamu	750 OR	150 OR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat-rapat	750 OR	150 OR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 laporan	n/a	44 laporan	44 laporan	100	44 laporan	88 laporan	50
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	48 unit	48 unit	48 unit	48 unit	100	48 unit	48 unit	100
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah belanja mebeleir kantor (meja kursi pegawai)	4 unit	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	n/a	0 unit	0 unit	0	1 unit	1 unit	33
6.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan SIM HP	1 unit	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	n/a	0 unit	0 unit	0	1 unit	1 unit	100
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan korden	5 unit	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor interior ruang (bantuan disabilitas)	25 unit	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 unit	n/a	6 unit	6 unit	100	6 unit	12 unit	50
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	100	3 layanan	3 layanan	100
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	3000 surat	30 surat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	n/a	12 laporan	12 laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	50
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana jasa air yang tersedia (1 Rekening x 12)	60 rekening	12 rekening	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Sarana jasa listrik yang tersedia (1 Rekening x12)	60 rekening	12 rekening	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Sarana jasa telepon yang tersedia (1 Rekening x 12)	60 rekening	12 rekening	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	n/a	36 laporan	36 laporan	100	36 Laporan	72 Laporan	50
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	60 bulan	10 Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		jumlah jasa kebersihan kantor dibayar	48 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100	4 layanan	4 layanan	100
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas roda 2 terpelihara	40 unit	8 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dan jenis kendaraan dinas roda 4 terpelihara	35 unit	7 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	40 unit	8 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	35 unit	7 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	832 Unit	n/a	208 unit	208 unit	100	208 Unit	416 Unit	50

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	14 unit	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	225 unit	10 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	10 unit	2 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	168 unit	n/a	42 unit	42 unit	100	42 unit	84 unit	50
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	450 meter	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	n/a	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	75 unit	5 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 unit	n/a	15 unit	15 unit	60	15 unit	30 unit	50

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	25 dokumen	25 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Nilai IKM PD	79,45 indeks	79,45 indeks	79,35 indeks	-	-	79,45 indeks	79,45 indeks	100
6.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen RTP SPIP	10 dokumen	2 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen SOP	5 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	10 dokumen	2 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100	4 layanan	4 layanan	100
		Persentase hasil pengawasan internal ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah dan PD yang direviu (KUA PAS murni dan perubahan; RKA murni dan perubahan; dan Review BTT)	480 dokumen	96 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	384 Laporan	n/a	96 laporan	96 laporan	100	96 Laporan	192 Laporan	50

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	10 Dokumen	2 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah objek pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kinerja	420 Auditan	84 Auditan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah obyek Evaluasi tindak lanjut	240 Obyek	48 Obyek	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	352 Laporan	n/a	88 laporan	88 laporan	100	88 Laporan	172 Laporan	50
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen hasil review Renstra 2021-2024	1 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen hasil reviu laporan keuangan Pemda	5 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah dan PD yang direviu (RKPD murni dan perubahan; Renja murni dan perubahan)	20 dokumen	4 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	20 Laporan	n/a	5 laporan	5 laporan	100	5 Laporan	10 Laporan	50

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen review DAK dan review lainnya sesuai amanat pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat	150 dokumen	30 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	120 Laporan	n/a	30 laporan	30 laporan	100	30 Laporan	60 Laporan	50
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	600 dokumen	600 dokumen	120 dokumen	120 dokumen	100	120 dokumen	120 dokumen	100
		Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil Laporan pemeriksaan khusus	250 dokumen	50 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen Laporan Saber Pungli	5 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	10 dokumen	2 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	212 Laporan	n/a	53 laporan	40 laporan	75	53 Laporan	93 Laporan	44

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100	9 dokumen	9 dokumen	100
		Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen PKPT, Peta Pengawasan, KMA	15 dokumen	3 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	12 Rekomendasi	n/a	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100	3 Rekomendasi	6 Rekomendasi	50

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen penyusunan alternatif penyelesaian masalah/langkah strategis untuk percepatan pencapaian kinerja pemerintah daerah : Nota dinas, action plan.	10 dokumen	2 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen telaahan staf	20 dokumen	4 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	24 Rekomendasi	n/a	6 rekomendasi	6 rekomendasi	100	6 Rekomendasi	12 Rekomendasi	50
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	100	3 layanan	3 layanan	100
		Persentase pendampingan dan asistensi terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen hasil asistensi/ pendampingan	480 dokumen	98 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	764 Perangkat Daerah	n/a	191 Perangkat Daerah	191 Perangkat Daerah	100	191 Perangkat Daerah	382 Perangkat Daerah	50
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System	10 dokumen	2 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan	5 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen hasil evaluasi ZI, WBK, WBBM	5 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen laporan money Korsupgah KPK	20 dokumen	4 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen money gratifikasi	5 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Dokumen money PMPRB	5 dokumen	1 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
		Jumlah hasil evaluasi maturitas SPIP	35 dokumen	8 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	764 Perangkat Daerah	n/a	191 Perangkat Daerah	191 Perangkat Daerah	100	191 Perangkat Daerah	382 Perangkat Daerah	50

Faktor penyebab/penghambat :

- Faktor penyebab disebabkan karena kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan lintas SKPD, seperti pada kegiatan Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah dan kegiatan Penyelenggaraan Saber Pungli.
- Keterbatasan pegawai yang ada di Inspektorat termasuk dalam Jabatan Fungsional Auditor yang tidak sebanding dengan beban kerja dan tugas yang dilimpahkannya. Demikian pula pada unsur yang bernaung di bawah kesekretariatan.
- Masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Desa yang tidak segera menindaklanjuti hasil rekomendasi terkait dengan hasil laporan pemeriksaan.

Faktor pendukung :

- Faktor pendukung yaitu adanya koordinasi sistem informasi dan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan pengendalian program kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Termasuk pembuatan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul serta kode etik Inspektorat.

Kebijakan/tindakan yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi faktor penghambat antara lain :

- Melakukan optimalisasi pembagian Auditor dan unsur penunjang Administrasi Pengawasan dengan memperhatikan beban kerja yang merata. Selain itu diupayakan untuk penambahan pegawai Jabatan Fungsional Auditor lewat jalur mutasi dari pegawai Jabatan Fungsional Umum dan atau Jabatan Struktural. Mengusulkan penambahan pegawai untuk
- Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance Consulting* dan *Early Warning*.
- Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal.
- Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan - kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan,
- Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan pendampingan dalam rangka kegiatan penyusunan laporan keuangan terhadap seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Disamping itu juga melaksanakan asistensi terhadap 144 kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul terkait pertanggungjawaban APBKal dan penyusunan Rencana APBKal tahun berikutnya.
- Membuka layanan klinik konsultasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat capaian kinerja instansi secara keseluruhan adalah dengan melihat tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan pada dasarnya diambil dari indikator *outcome* dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dengan kata lain tingkat capaian kinerja instansi keseluruhan sebenarnya merupakan cermin dari keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan semua kegiatan.

Program dan kebijakan yang ada pada dasarnya merupakan suatu cara untuk mencapai sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah mengacu pada sasaran pembangunan menurut prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 yaitu *“Reformasi Birokrasi”* dengan 2 (dua) sasaran daerah yaitu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkatkan.

Pencapaian kinerja pelayanan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Inspektorat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indikator Kinerja Utama (IKU)										
	Nilai Maturitas SPIP	Indeks	3,2	3,86	3,88	3,89	3,85	3,85	3,87	3,88	Interval skor <i>Matirity Level SPIP</i> . Menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,00	81,00	81,50	82,00	81,77	81,77	81,50	82,00	Hasil dari Reviu Irda terkait evaluasi LKjIP Perangkat Daerah
2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)										
	Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah program dalam Renja dibagi jumlah program dalam RKPD dan jumlah program dalam Renstra dibagi jumlah program dalam RPJMD
	Nilai IKM Inspektorat	Nilai	81	81	81,5	81,5	79,32	80,06	81,5	81,5	Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah unsur yang terisi dikali nilai penimbang
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah realisasi pemenuhan administrasi perkantoran dibagi jumlah administrasi perkantoran yang dibutuhkan x 100%
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran sarana prasarana aparatur	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah realisasi pemenuhan sarana dan prasarana dibagi jumlah sarana dan prasarana yang direncanakan x 100%
	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang dibagi jumlah PNS x 100%
	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah laporan keuangan disusun tepat waktu dibagi jumlah laporan keuangan disusun x 100%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas internal, Inspektorat Daerah menghadapi beberapa permasalahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD yang telah dirumuskan, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Kondisi :

- a. masih kurangnya efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan program kegiatan Perangkat Daerah dan Kalurahan;
- b. belum efektifnya pengawasan melekat dan verifikasi berjenjang;
- c. Keterbatasan sumber daya manusia pemerintah dan distribusi yang belum merata sehingga terjadi penumpukan pekerjaan pada beberapa personil;
- d. masih cukup banyaknya temuan-temuan pemeriksaan pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan
- e. masih kurangnya pemahaman perangkat kalurahan dan masyarakat dalam masalah hukum.

Permasalahan :

- a. kecenderungan dalam pelaksanaan pemerintahan yang cenderung masih relative belum efektif dan efisien, serta bersifat rutinitas, juga belum secara optimal menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Sistem pengendalian internal belum berjalan secara efektif;
- c. keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia hampir pada semua Perangkat Daerah;
- d. sistem pembinaan PNS belum memadai dan kinerja PNS belum maksimal, dan kompetensi pegawai belum sesuai dengan formasi jabatan;
- e. masih kurangnya pemahaman aparatur pemerintah dan/atau aparat pemerintah kalurahan terhadap regulasi.

2. Dampak terhadap Pencapaian

Sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah berfokus pada misi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas KKN. Hal tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Inspektorat Daerah sebagai pembantu Bupati di Bidang Pengawasan. Jika dilihat dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dalam pelaksanaan/pencapaian misi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat.

Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua aparatur pengawasan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Belum terpenuhinya sumber daya manusia baik untuk Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD maupun fungsional umum;
- c. Sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan yang belum memadai;
- d. Jumlah anggaran untuk APIP belum bisa memenuhi ketentuan Permendagri;
- e. Perubahan paradigma pengawasan dari *watchdog* menjadi *assurance* memerlukan kesiapan dan komitmen seluruh komponen APIP; dan

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan PD

Analisis strategis dalam rangka menentukan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dibagi dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan (faktor intern) lebih mudah dibanding mengidentifikasi faktor ekstern terutama merumuskan ancaman. Lingkungan internal terdiri dari kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi.

Kekuatan

Pada dasarnya, Inspektorat Daerah mempunyai beberapa hal yang dapat menjadi faktor pendukung pencapaian tujuan organisasi yaitu :

- a. Kode Etik dan Standar Kerja yang jelas
Beberapa standar kerja Inspektorat antara lain Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kabupaten Gunungkidul. Standar Kerja disusun untuk menjaga agar kualitas hasil pengawasan tidak mengalami penurunan.
- b. Pembagian kerja dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
- f. Piagam Audit (*Audit Charter*).
- g. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Gunungkidul dan Surat Perintah Tugas sebagai aplikasi program kerja Inspektorat Daerah yang merupakan rangkaian ketentuan mengenai pembagian kerja.

Kelemahan

Hal-hal yang masih menjadi kelemahan Inspektorat Daerah yaitu :

- a. Kurangnya jumlah auditor (JFA), P2UPD, dan JFU
Sesuai dengan analisis jabatan Inspektorat Daerah tahun 2017, kebutuhan SDM di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu : auditor JFA 62 orang, P2UPD 18 orang dan JFU 27 orang. Sedangkan kondisi eksisting jumlah SDM saat ini yaitu : JFA 29 orang, P2UPD 5 orang, dan JFU 6 orang. Dengan demikian kekurangan jumlah auditor, P2UPD dan JFU masih kurang signifikan, atau ketersediaan SDM baru sebesar 42%.
- b. Pemenuhan kompetensi auditor dan P2UPD belum dapat memenuhi ketentuan dan belum merata.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang maka setiap auditor dan P2UPD harus mengikuti diklat minimal 120 jam pertahun.
Berdasarkan peta kompetensi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, kondisi pemenuhan kompetensi SDM di Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Kebutuhan	Existing	Kekurangan
1.	Pejabat struktural	9	9	0
2.	Pelaksana	27	6	21
3.	Auditor	62	29	33
4.	P2UPD	18	5	8

- c. Prasarana dan sarana kerja yang belum memadai.

Selain belum mencukupinya sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana kerja juga tidak sebanding dengan beban kerja, dan secara umum belum mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, seperti kendaraan operasional untuk mendukung sistem kerja tim, ruang dokumen/arsip yang masih terbatas, dan alat penguji/pendukung pemeriksaan.

- d. Belum tersedianya system / aplikasi E-audit yang komprehensif untuk mendukung kecepatan, ketepatan, dan optimalisasi layanan pemeriksaan.

Kebutuhan akan e-audit saat ini sudah sangat urgen mengingat jumlah SDM auditor maupun SDM pada obyek pemeriksaan yang semakin terbatas. Selain itu dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, perlu diimbangi dengan tool atau alat kerja yang memadai, termasuk dalam kegiatan pengawasan dan audit. Saat ini di Irda sudah mengembangkan SIMTLHP (Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) sebagai inovasi untuk mendukung optimalisasi kinerja Irda. Aplikasi ini akan terus dikembangkan lebih komprehensif menjadi aplikasi induk, yang didalamnya memuat beberapa modul yang dibutuhkan untuk melakukan *e-audit*.

Peluang (*Opportunities*)

Faktor-faktor dari luar Inspektorat Daerah yang memberikan kemungkinan organisasi bisa eksis, tumbuh, dan berkembang, serta menjadi potensi bagi organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar yaitu :

1. Regulasi yang mengatur Sistem Pengawasan Internal.

Semua teori manajemen menyebutkan pengawasan atau pengendalian (*controlling*) sebagai salah satu fungsi manajemen. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mutlak memerlukan Inspektorat Daerah untuk menjamin dilaksanakannya kebijakan demi tertibnya organisasi sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

2. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penegakan hukum.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, masyarakat menginginkan suatu pemerintahan yang lebih baik. Isu KKN ditanggapi oleh Pemerintah dengan mengeluarkan seperangkat kebijakan pemberantasan KKN. Beberapa kebijakan yang dapat dikemukakan antara lain :

- a. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara; dan

- e. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
3. Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin pesat
Teknologi informasi menjadi peluang besar untuk mendukung ketugasan dan kinerja Inspektorat Daerah, karena melalui TI akan dapat mempermudah, mempercepat, serta mendorong akuntabilitas dalam penugasan.
4. Perkembangan media massa yang semakin pesat
Media massa menjadi peluang dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga melalui kontrol media massa, aparat pemerintah baik di Pemda maupun kalurahan diharapkan kinerjanya akan lebih baik, transparan dan akuntabel
5. Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan.
Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan adalah Lembaga/PD dan Kalurahan dalam wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagai UPT dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian semua potensi yang ada dapat dilaksanakan secara optimal. Setiap tahunnya Inspektorat telah berusaha melaksanakan pendampingan terhadap 5 (aspek) pemeriksaan seperti Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Penatausahaan Keuangan Aset, Persediaan, Pengelolaan Piutang Daerah, Hibah dan Bantuan Sosial, selain itu juga melakukan asistensi dengan sasaran penyusunan pertanggungjawaban APBKal serta penyusunan Rencana APBKal terhadap 144 kalurahan.

Ancaman (Threats)

Faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang berpotensi mengancam eksistensi organisasi yaitu :

1. Kurangnya optimalnya dukungan atau komitmen beberapa stakeholder terhadap pengawasan.
2. Kurangnya kepedulian obyek pemeriksaan terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan.
Kepedulian obyek pemeriksaan dalam tindaklanjut hasil pemeriksaan diukur dari kecepatan penyelesaian pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan.
Semakin lambat tindaklanjut diselesaikan, semakin rendah tingkat kepedulian obrik terhadap eksistensi Inspektorat Daerah dan perbaikan kinerja instansi itu sendiri.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 adalah :

1. Ketersediaan data dan kelengkapan pemeriksaan.
2. Penambahan PNS baik Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD untuk memenuhi kekurangan personel pemeriksa, serta penambahan SDM Fungsional Umum untuk membantu tugas-tugas di kesekretariatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil revidi, semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD namun terdapat penyesuaian anggaran pada beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini berimplikasi ke arah penyederhanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dibutuhkan.

Penjabaran program kegiatan berdasarkan revidi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tertuang pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

No	Rencana Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	1.691.118.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100 Persen	1.691.118.900	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 layanan	11.714.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 layanan	11.714.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.279.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.279.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	494.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	494.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	494.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	494.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3 Dokumen	1.506.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidul,	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	3 Dokumen	1.506.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	925.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	925.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	1.718.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	1.718.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.298.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.298.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	29 Dokumen	3.693.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	29 Dokumen	3.693.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 Orang/bulan	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 Orang/bulan	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	693.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	693.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	3.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	49 orang	343	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	49 orang	350.455.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	14.007.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	14.007.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	344.780.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	344.780.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan administrasi umum terlayani	5 layanan	843.356.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan administrasi umum terlayani	5 layanan	843.356.400	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.617.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.617.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	136.974.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	136.974.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	164.063.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	164.063.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.317.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.317.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	260 Dokumen	1.080.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	260 Dokumen	1.080.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	13.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	13.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	499.805.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan	499.805.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	48 Unit	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	48 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	3 Layanan	131.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	3 Layanan	131.300.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.300.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	125.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	125.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	4 Layanan	300.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	4 Layanan	300.600.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	208 Unit	185.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	208 Unit	185.600.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	18.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	18.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	85000000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	85.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	12.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	12.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100 Persen	1.724.801.100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100 Persen	1.724.801.100	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	4 Layanan	801.286.100	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	4 Layanan	801.286.100	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	96 Laporan	170.190.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	96 Laporan	170.190.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	88 Laporan	99.620.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	88 Laporan	99.620.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	140.876.100	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	140.876.100	
	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Laporan	390.600.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Laporan	390.600.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	120 Dokumen	923.515.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	120 Dokumen	923.515.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	53 Laporan	923.515.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	53 Laporan	923.515.000	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	100 Persen	584.080.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	100 Persen	584.080.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	9 Dokumen	5.900.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	9 Dokumen	5.900.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	2.950.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	2.950.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	2.950.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	2.950.000	
	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana	3 Layanan	578.180.000	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana	3 Layanan	578.180.000	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	191 perangkat daerah	570.650.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	191 perangkat daerah	570.650.000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Gunungkidul , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	191 perangkat daerah	7.530.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	191 perangkat daerah	7.530.000	
					4.000.000.000					4.000.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam mencari usulan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Inspektorat Daerah tidak ada usulan program atau kegiatan yang berhubungan langsung dari masyarakat, karena sesuai dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan.

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Gunungkidul

No	Usulan	Alamat	Indikator Kinerja	Koefisien/Volume	Harga Satuan	Anggaran	Catatan
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pada dasarnya Inspektorat Daerah bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri seperti halnya Perangkat Daerah (PD) yang lain di Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam operasional pengawasan Inspektorat Daerah lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut disebabkan karena BPKP merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Kondisi ini memunculkan beberapa permasalahan karena adanya perbedaan standar pengawasan yang diterapkan BPKP dengan standar dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan kondisi seperti ini, Inspektorat Daerah mengutamakan standar dari BPKP di samping standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menyesuaikan kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh yaitu kualitas sumber daya pengawasan hasil diklat BPKP mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang setara secara nasional.

Peran Inspektorat sebagai institusi pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar mentaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya, yang akan bermuara pada penegakan hukum di Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watch dog* menjadi *quality assurance*, Inspektorat Daerah mau tidak mau harus merubah paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat Daerah juga harus bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha menemukan permasalahan yang ada serta mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan utama dari kondisi-kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, profesional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjadi lebih berkualitas.

5.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Tujuan yang dijadikan pedoman Inspektorat Daerah adalah “Pengendalian Internal terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah meningkat”.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja serta mengacu pada tema dan prioritas pembangunan dan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Tema pembangunan Tahun 2025 berdasarkan Arah Kebijakan dalam Isu Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta adalah “Penguatan Ekonomi Daerah, Taraf Hidup Masyarakat, Infrastruktur, dan Peningkatan SDM yang Unggul” dan Inspektorat Daerah mengacu pada Sasaran Daerah “Reformasi Birokrasi”.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah ditetapkan tujuan dan target kinerja tujuan untuk tahun 2026, IKU PD, indikator dan target IKU PD. Adapun proyeksi terhadap target tujuan kinerja, dan target IKU PD tersebut sebagaimana berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Inspektorat Daerah

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026 dalam Renstra Tahun 2021-2026	Proyeksi Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal	Nilai Maturitas SPIP tahun 2026	3,90	3,90
		Nilai AKIP PD tahun 2026	83	83

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja IKU	Capaian Sasaran Tahun 2023	Target Kinerja IKU PD Tahun 2025 dalam Renstra Tahun 2021-2026	Proyeksi Target IKU PD Tahun 2025
1.	Nilai Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,99	3,89	3,89
2.	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	83,01	82,50	82,50

Sasaran Inspektorat Daerah untuk target IKU yang tertuang pada Renstra tidak ada perubahan karena berdasarkan laporan hasil evaluasi penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2023 Nomor PE.09.03/LHE-597/PW12/3/2023 disebutkan bahwa nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Gunungkidul sebesar 3,191 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (terdefinisi). Dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi.

Selanjutnya Pengukuran terhadap komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “3,9934”, sehingga proyeksi terhadap target Sasaran PD tersebut sebagaimana berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Inspektorat Daerah

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Capaian Sasaran Tahun 2023	Target Sasaran PD dalam RPJMD Tahun 2021-2026	Proyeksi Target Sasaran PD Tahun 2025
1.	Nilai Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,99	3,90	3,89
2.	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	83,01	83	82,50

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah dengan mempertimbangkan tugasnya dalam Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan serta Pengawasan Penyelenggaraan sebagian Urusan Keistimewaan di Daerah, maka Inspektorat Daerah mendukung Misi pertama Bupati yaitu “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis” Adapun Sasaran Daerah yang mendukung adalah “Kapasitas Tata Kelola Pemerintah meningkat” dengan berpegang pada Prioritas Daerah yaitu Reformasi Birokrasi.

Adapun sasaran, program dan kegiatan Inspektorat Daerah pada tahun 2025, tidak ada perubahan sebagaimana yang tertuang dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Inspektorat Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Nama Program/Kegiatan
1.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Program : Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 2. Pendampingan dan Asistensi
2.	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Rencana kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, prioritas pembangunan, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah. Pada tahun 2025 ini terdapat beberapa tambahan sub kegiatan baru yang disesuaikan dengan pemetaan nomenklatur Nomor 1350.

Pagu anggaran yang direncanakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat tahun 2025 sejumlah 8.538.739.106,00 (delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam rupiah).

Berdasarkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah mengacu pada prioritas yang kedua yaitu "*Reformasi Birokrasi*", seperti yang tertuang dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Prioritas, Sasaran Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD
Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP	82,50	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.214.880.806	IRDA
					6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.570.500	IRDA
					6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.225.000	IRDA
					6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	360.000	RDA
					6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	360.000	IRDA
					6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	642.000	IRDA
					6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	555.000	IRDA
					6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	736.000	IRDA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD
					6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.692.000	IRDA
					6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.343.944.106	IRDA
					6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,340.251.106	IRDA
					6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	693.000	IRDA
					6.01.01.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000	IRDA
					6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	343.308.800	IRDA
					6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.007.000	IRDA
					6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	329.301.800	IRDA
					6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	988.163.400	IRDA
					6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.630.400	IRDA
					6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	282.159.980	IRDA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD
					6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	181.171.000	IRDA
					6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.317.020	IRDA
					6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	IRDA
					6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000	IRDA
					6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	482.305.000	IRDA
					6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.214.000	IRDA
					6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	51.214.000	IRDA
					6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.330.000	IRDA
					6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000	IRDA
					6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.030.000	IRDA
					6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.350.000	IRDA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD
					6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.000.000	IRDA
					6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000	IRDA
					6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.710.000	IRDA
					6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.640.000	IRDA
		Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP	3,89	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.090.121.400	IRDA
					6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	842.025.000	IRDA
					6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	72.840.000	IRDA
					6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	62.620.000	IRDA
					6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	93.000.000	IRDA
					6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	133.310.000	IRDA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD
					6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	83.250.000	IRDA
					6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	37.005.000	IRDA
					6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	160.000.000	IRDA
					6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	448.096.400	IRDA
					6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	178.246.400	IRDA
					6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	269.850.000	IRDA
					6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.242.068.900	IRDA
					6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	15.400.000	IRDA
					6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8.950.000	IRDA
					6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	6.450.000	IRDA

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD
					6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1.226.668.900	IRDA
					6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	583.320.000	IRDA
					6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	14.810.000	IRDA
					6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	518.732.500	IRDA
					6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi, Penegakan Integritas	109.806.400	IRDA

Tabel 4.3
 Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi
 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2025

No.	PROGRAM/KEGIATAN	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Maju (Rp)	PD
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.214.880.806	9.544.235.284	IRDA
	Kegiatan :			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.570.500	75.718.015	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.343.944.106	8.695.322.884	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	343.308.800	89.008.500	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	988.163.400	364.075.883	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.214.000	0	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.330.000	166.402.502	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.350.000	153.707.500	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.090.121.400	1.193.000.000	IRDA
	Kegiatan :			
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	842.025.000	601.000.000	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	448.096.400	592.000.000	
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.242.068.900	324.652.100	IRDA
	Kegiatan :			
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	15.400.000	6.992.450	
3.2	Pendampingan dan Asistensi	1.226.688.900	317.659.650	
		8.547.071.106	11.061.887.384	

Tabel 4.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	INSPEKTORAT DAERAH		Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		8.547.071.106	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			11.061.887.384
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	6.214.880.806	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	9.544.235.284
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 layanan	62.570.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 layanan	75.718.015
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	58.225.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	66.633.180
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	360.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	607.225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	360.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	609.900
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	642.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	1.848.960
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	555.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	1.134.200
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Laporan	736.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		17 Laporan	2.102.550
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	1.692.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Laporan	2.782.000
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Dokumen	4.343.944.106	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		29 Dokumen	8.695.322.884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700 Orang/bulan	4.340.251.106	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		700 Orang/bulan	8.686.559.584
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	693.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	845.300
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Laporan	7.918.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49 orang	343.308.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		49 orang	89.008.500
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	14.007.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Dokumen	7.008.500
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41 Orang	329.301.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Orang	82.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum terlayani	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 layanan	988.163.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 layanan	364.075.883
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	9.630.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Paket	14.022.350
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	282.159.980	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Paket	57.500.000
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	181.171.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Paket	131.470.270
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	18.317.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Paket	21.031.813
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260 Dokumen	1.080.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		260 Dokumen	1.674.550
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan,	4 Laporan	13.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA		4 Laporan	5.250.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Semua Kel/Desa			ALOKASI UMUM			
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Laporan	482.305.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		44 Laporan	133.126.900
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Unit	51.214.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		48 Unit	0
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	51.214.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	0
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Layanan	130.330.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Layanan	166.402.502
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	6.300.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	1.402.502
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	124.030.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		36 Laporan	165.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Layanan	285.350.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Layanan	153.707.500
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208 Unit	178.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		208 Unit	115.000.000
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42 Unit	18.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		42 Unit	17.575.000
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	78.710.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	0
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	20.640.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Unit	21.132.500
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1.090.121.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	1.193.000.000
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Layanan	842.025.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Layanan	601.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 Laporan	72.840.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		96 Laporan	165.000.000
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Laporan	62.620.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		88 Laporan	165.000.000
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	93.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Laporan	115.000.000
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Laporan	133.310.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		30 Laporan	156.000.000
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	83.250.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0	0
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 kesepakatan	37.005.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0	0
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	160.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Dokumen	448.096.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		120 Dokumen	592.000.000
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Laporan	178.246.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0	0
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	269.850.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		53 Laporan	592.000.000
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	1.242.068.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100 Persen	324.652.100
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	15.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Dokumen	6.992.450
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Rekomendasi	8.950.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Rekomendasi	3.488.200
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Rekomendasi	6.450.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 Rekomendasi	3.504.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Layanan	1.226.668.900	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Layanan	317.659.650
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191 perangkat daerah	583.320.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		191 perangkat daerah	307.500.000
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191 perangkat daerah	14.810.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		191 perangkat daerah	10.159.650
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Kegiatan	518.732.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0	0
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Gunungkidu 1, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 perangkat daerah	109.806.400	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		0	0
Jumlah					8.547.071.106				11.061.887.384

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Inspektorat sebagai pemilik fungsi pengendalian intern atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi paparan risiko PD dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen risiko. Manajemen risiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing PD yang memiliki risiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka pemantauan perkembangan penyelesaian temuan.
2. Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan internal maupun eksternal.
3. Melaksanakan asistensi/pendampingan terhadap 144 kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban APBKal dan rencana penyusunan APBKal tahun berikutnya.
4. Membuka layanan klinik konsultasi.
5. Melakukan Survei Penilaian Integritas.
6. Meningkatkan Kapasitas SDM, Sarana dan Prasarana.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Wonosari,
INSPEKTORAT DAERAH,

SAPTOYO

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA